

ANALISIS DAYA SAING EKONOMI KOTA TEBING TINGGI

Diviya Bardi
Paidi Hidayat, SE, M.Si

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014 yang menggunakan Analisis Hierarki Proses (AHP). Penelitian ini data primer dengan kuisisioner dan wawancara terhadap 30 responden yang terdiri dari mahasiswa, staf/pengajar, tokoh masyarakat, birokrasi, perbankan, non perbankan dan pengusaha.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi, yang pertama adalah infrastruktur fisik (0,272), kemudian faktor tenaga kerja dan produktivitas (0,239), faktor kelembagaan (0,205), faktor perekonomian daerah (0,169), dan posisi yang terakhir sosial politik (0,116).

Kata kunci : Daya Saing Ekonomi, Analisis Hierarki Proses.

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah ini pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia menghadapi persoalan dalam membangun ekonomi maka suatu daerah harus membangun perekonomian yang memiliki daya saing dan efisiensi. Pada era otonomi daerah ini maka program pembangunan ekonominya harus desentralisasi dan memiliki daya saing, sehingga cakupannya lebih luas dan tidak hanya sekedar pembangunan ekonomi daerah.

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi lokal atau daerah. Daya saing daerah juga banyak diartikan sebagai kemampuan perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan daya saing secara cepat dan dinamis di kawasan Asia-Pasifik. " *Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF)* " melalui portalnya mempublikasikan ranking daya saing global (*The Global Competitiveness Report/GCR*) tahun 2014-2015 Indonesia menempati peringkat 34 dari 144 negara, atau naik 4 tingkat dari posisi sebelumnya 38 (tahun 2013-2014), dan posisi ke-50 pada 2012-2013. Menurut *WEF*, kenaikan ranking indeks daya saing Indonesia pada periode ini dikarenakan perbaikan di beberapa kriteria seperti infrastruktur dan konektivitas, kualitas tata

kelola sektor swasta dan publik, efisiensi pemerintahan, dan pemberantasan korupsi. *WEF* sendiri mengelompokkan Indonesia sebagai lima besar ekonomi ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang terus memperbaiki peringkat daya saing mereka sejak tahun 2009.

The Global Competitiveness Report's didasarkan pada *Global Competitiveness Index (GCI)*, yang diperkenalkan *World Economic Forum* pada tahun 2004. Laporan ini mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Skor *GCI* dihitung berdasarkan 12 kategori yakni institusi atau lembaga, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Dari ke-12 kategori itu, total skor yang diraih Indonesia adalah 38, mengungguli sejumlah negara di Eropa seperti Spanyol (35), Portugal (36), dan Italia (49); negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait (40), Bahrain (44), atau Oman (46); juga negara-negara Asia seperti Filipina (52), Vietnam (68), dan India (71). Adapun negara-negara Asia yang posisinya di atas Indonesia antara lain adalah Singapura (2), Jepang (6), Taiwan (14), Malaysia (20), Korsel (26), China (28), dan Thailand (31).

Sejak otonomi daerah tahun 2001, Kota Tebing Tinggi mengalami perubahan yang diakibatkan karena pemekaran. Pemekaran Kota Tebing Tinggi terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 9 November 2006. Kotamadya Tebing Tinggi yang memiliki luasnya 38,438 km², yang pada tahun 2006 dilakukan pemekaran. Dengan 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Kelima kecamatan itu terdiri dari, yaitu: 1). Padang Hilir, 2). Padang Hulu, 3). Rambutan, 4). Tebing Tinggi Kota, dan 5). Bajenis.

Dari hasil penelitian PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008) dalam neraca daya saing daerah, Kota Tebing Tinggi berada di peringkat ke-148 secara keseluruhan dalam daya saing daerah dari 434 neraca daya saing daerah. Berdasarkan input perekonomian daerah, Kota Tebing Tinggi berada di peringkat ke-251. Peringkat ini masih di bawah Kabupaten dan Kota lainnya di Sumatera Utara seperti Kabupaten Asahan yang berada di peringkat ke-73, Kabupaten Deli Serdang di peringkat ke-95, dan Kota Tanjung Balai di peringkat ke-103. Berdasarkan input SDM dan ketenagakerjaan, Kota Tebing Tinggi berada di peringkat ke-245. Berdasarkan input infrastruktur, SDA, dan lingkungan, berada di peringkat ke-130. Dan berdasarkan output tingkat kesempatan kerja, kota Tebing Tinggi berada di peringkat ke-389. Ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Tebing Tinggi dan infrastruktur yang masih belum memadai.

TINJAUAN PUSTAKA

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat UK-DTI adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan

pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Ukuran daya saing ekonomi sebenarnya ditentukan oleh empat faktor di atas, yakni kebijakan pemerintah, kelembagaan dan kemampuan, serta birokrasi yang efisien. Pengembangan keempat faktor ini merupakan birokrasi yang efisien. Pengembangan keempat faktor ini merupakan kunci bagi pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi daerah. Kualitas kelembagaan dan kemampuan nasional tidak hanya tercermin atas prestasi pada tingkat pusat saja, tetapi atas dasar yang ada di seluruh Indonesia. Dengan demikian daya saing ekonomi daerah, tetapi harus bersaing dalam ukuran internasional (Halwani, 2002:422).

Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah yang didesain dengan standar internasional. Kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah, memperkuat sumber daya manusia aparatur (*birokrasi*) dan masyarakat daerah, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki daya saing yang tinggi pada era globalisasi ekonomi ini.

Konsep Daya Saing Daerah

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter, 2000). Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperjelas konsep daya saing daerah adalah berdasarkan definisi *European Commission* yang mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggikan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal” (*European Commission*, 1999 P.4 dalam Gardiner, Martin dan Tyler, 2004).

Sementara Huggins (2007) dalam publikasi “*UK Competitiveness Index*” mendefinisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat di dalamnya”. Dalam pengertian daya saing ini secara tersirat dinyatakan pula bahwa kondisi perekonomian yang kondusif merupakan suatu syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Daya saing yang di timbulkan dalam arti persaingan yang fair, dapat juga merupakan potensi untuk aliansi, karena potensi aliansi pada dasarnya adalah merupakan kemampuan daerah atau pesaing lain menjadi aliansi kekuatan bersama (Halwani, 2002:423).

Indikator Utama Daya Saing Daerah

Penentuan indikator utama daya saing ekonomi daerah merupakan bagian terpenting dalam analisis daya saing ekonomi daerah. Pemahaman indikator utama daya saing ekonomi daerah yang terbatas dan tidak secara *komprehensif* menjadikan tidak adanya keseragaman pemahaman yang benar oleh *stakeholders* ditingkat pemerintahan daerah dan pada gilirannya akan dapat menyebabkan adanya perbedaan analisis dan kesimpulan terhadap tingkat daya saing yang dimiliki oleh suatu daerah.

Keunggulan daya saing suatu daerah ditentukan oleh 4 faktor pokok dan 2 faktor penunjang (Porter, 1990). Empat faktor pokok yang dimaksud adalah faktor produksi (*factor condition*), kondisi permintaan pasar (*demand condition*), industri-industri terkait dan industri-industri pendukung (*related and supporting industries*) serta strategi perusahaan, struktur dan persaingan (*firm strategy, structure and rivalry*). Sedangkan faktor penunjangnya adalah peluang (*chance*) dan peranan pemerintah (*role of government*).

Penelitian yang dilakukan PPSK BI dan UNPAD (2008) menggunakan 9 indikator utama penentu daya saing ekonomi daerah, yang meliputi : (1) Perekonomian Daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem Keuangan, (4) Infrastruktur & Sumber Daya Alam, (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (6) Sumber Daya Manusia, (7) Kelembagaan, (8) Governance & Kebijakan Publik, dan (9) Manajemen Ekonomi Mikro. Sedangkan hasil Irawati dkk (2008) yang mengukur tingkat daya saing daerah di wilayah Sulawesi Tenggara menggunakan variabel perekonomian daerah, infrastruktur, sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Sementara itu, hasil penelitian KPPOD (2005) yang meliputi daya tarik investasi Kabupaten/Kota di Indonesia dan menggunakan variabel kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas dan variabel infrastruktur fisik.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan kurun waktu penelitian selama 1 bulan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menyamakan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan batasan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Kelembagaan yaitu mengukur seberapa kondusif iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan dalam mendukung perekonomian daerah.

2. Sosial Politik

Sosial Politik, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik, yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial budaya.

3. Ekonomi Daerah

Ekonomi Daerah, yaitu merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian daerah secara makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

4. Tenaga Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendirimaupun untuk masyarakat.

5. Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik, yaitu sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem stuktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektoral public dan sektoral privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Metode Pengambilan Sampel dan Jumlah Sampel

Prosedur pengambilan sampel atau responden dilakukan secara *purposive sampling*, yakni dengan menentukan sampel atau responden yang dianggap dapat mewakili segmen kelompok masyarakat yang dinilai mempunyai pengaruh atau merasakan dampak besar terkait daya saing ekonomi daerah.

Dalam penelitian ini sample yang di ambil sebanyak 30 responden yang terdapat di 5 kecamatan dan 35 kelurahan Kota Tebing Tinggi. Adapun jumlah sampel berdasarkan kelompok masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Sampel Berdasarkan Kelompok Masyarakat

NO	Kelompok Masyarakat	Responden
1	Mahasiswa /Pelajar	3
2	Staf Pengajar/Dosen/Guru	3
3	Tokoh Masyarakat	4
4	Birokrat	4
5	Perbankan	3
6	Non Perbankan	3
7	Pengusaha	10
	Jumlah	30

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama yang menjadi objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan juga pengisian kuisisioner terhadap kelompok masyarakat yang dijadikan sampel.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan publikasi secara resmi, buku-buku, majalah-majalah serta laporan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuisisioner

Para penduduk yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini diberikan lembaran kuisisioner. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari kelompok masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sampel adalah untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai saran atau keluhan masyarakat secara langsung terhadap faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis daya saing ekonomi kabupaten Asahan meliputi analisis deskriptif dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Secara jelasnya, metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Analisis ini memberikan gambaran tentang karakteristik tertentu dari data yang telah dikumpulkan. Data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014. Analisis data disajikan dalam bentuk tabulasi, gambar (chart) dan diagram.

2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analisis ini digunakan untuk memberikan nilai bobot setiap faktor dan variabel dalam menghitung faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2014. Proses pemberian bobot indikator dan sub-indikator (variabel) dilakukan dengan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) melalui kuisisioner untuk kelompok masyarakat yang sudah ditentukan sebelumnya dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) awalnya dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School sekitar tahun 1970. Metode ini digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan pilihan dari berbagai alternatif.

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

1. Resiprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat kebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting dari pada B maka B adalah $1/k$ lebih penting dari A.

2. Homogeneity, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. Dependence, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (complete hierarchy) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplete hierarchy).
4. Expectation, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain :

1. *Decomposition*, proses penguraian permasalahan faktor dan variabel sehingga membentuk suatu tingkatan prioritas.
2. *Comperative Judgement*, proses penilaian tingkat kepentingan relatif terhadap elemen yang terdapat pada suatu tingkatan sehubungan dengan tingkat di atasnya yang di sajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.
3. *Synthesis of Priority*, mencari eigen vector yang menunjukkan sinetesis local priority pada suatu hirarki.
4. *Logical Consistency*, melihat tingkat konsistensi jawaban responden dan diperbolehkan melakukan perbaikan penilaian yang diberikannya tidak konsisten.
5. *Matriks Pairwise*, dimana tidak ada yang bernilai 0 ataupun negatif sehingga dengan skala 1-9, maka syarat tersebut terpenuhi karena elemen terkecil 1/9 dan terbesar 9.

Berikut ini arti dari angka 1-9 dalam skala penilaian perbandingan seperti yang di tunjukkan pada tabel .

Tabel 2
Skala Penilaian perbandingan

Skala Tingkat Kepentingan	Defenisi	Keterangan
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkam dengan elemen pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan yang tertinggi
2,4,6,8	Nilai tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/A_{ji}$	Bila aktivitas i memperoleh suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan i

Sumber: Thomas L. Saaty (1991)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tabulasi terhadap 30 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini didapat informasi bahwa responden berjenis kelamin pria sebesar 44% dan berjenis kelamin wanita sebesar 56%. Sedangkan responden yang paling banyak diwawancarai berusia 20-30 tahun berkisar 50%. Kemudian diikuti oleh usia 41-50 berkisar sebesar 20%. Lalu usia 31-40 berkisar 13.3%. Dan yang berusia diatas 50 tahun sebesar 10%.Serta yang berusia dibawah 20 tahun sebesar 6.7%. Sementara itu untuk tingkat pendidikan, pada umumnya responden tamatan D3/S1/S2 sebesar 60%, sedangkan yang tamatan SMA/Sederajat sebesar 36.7%. Sisanya 3.3% responden yang tamatan SMP/Sederajat. Untuk lebih jelasnya, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Karakteristik Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	13	44
2	Wanita	17	56
No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	20<	2	6.7
2	20-30	15	50
3	31-40	4	13.3
4	41-50	6	20
5	>50	3	10
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP/Sederajat	1	3.3
2	SMA/Sederajat	11	36.7
3	D3/S1/S2	18	60

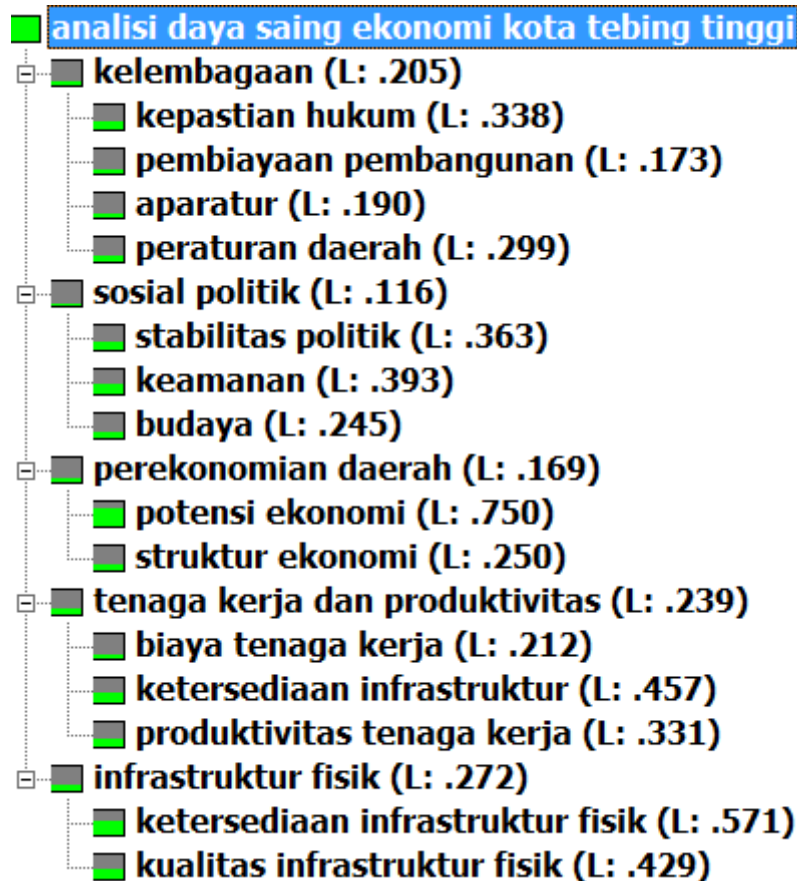
sumber : Data Primer Diolah

Pembobotan dan Pemingkatan Faktor Daya Saing Ekonomi

Daya saing ekonomi daerah merupakan representasi dari dari kinerja indikator-indikator pembentuknya. Semakin baik kinerja indikator-indikator pembentuknya, maka akan semakin tinggi daya saing ekonomi suatu daerah. Sebaliknya, apabila kinerja indikator-indikator pembentuk daya saing ekonomi tersebut rendah, maka daya saing ekonomi daerah tersebut juga rendah. Untuk melihat daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi, maka terlebih dahulu ditentukan faktor-faktor penentu daya saing ekonomi dengan menentukan nilai bobot dari masing-masing faktor tersebut. Pembobotan ini diperoleh dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan *Software* yaitu *Expert Choice*.

Pembobotan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2014. Bobot yang lebih besar dari suatu faktor menunjukkan bahwa faktor tersebut lebih

penting dibandingkan dengan faktor lainnya dalam menentukan daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi. Berikut ini hasil pembobotan dari faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1
Nilai Bobot dari Faktor Penentu Daya Saing
Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Hasil diatas menunjukkan bahwa faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2014 adalah faktor infrastruktur fisik yang memiliki bobot paling tinggi yaitu sebesar 0,272. Kemudian diikuti oleh faktor tenaga kerja dan produktivitas sebesar 0,239. Berikutnya faktor kelembagaan dengan bobot sebesar 0,205 dan kemudian faktor perekonomian daerah dengan bobot sebesar 0,169. Faktor sosial politik berada di urutan terakhir dengan bobot sebesar 0,116.

Dari hasil pembobotan tersebut, tanggapan responden terhadap faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi dipengaruhi oleh tiga faktor dengan nilai bobot terbesar, yaitu faktor infrastruktur, faktor tenaga kerja dan produktivitas, serta faktor kelembagaan. Faktor infrastruktur dianggap penting karena faktor tersebut menjadi tolak ukur bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Berikut akan dijelaskan masing-masing faktor

penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi berdasarkan pemeringkatan beserta variabelnya.

Faktor Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik merupakan faktor pendukung bagi kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik sangat mempengaruhi kelancaran dunia usaha di suatu daerah. Semakin besar skala suatu usaha, maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur fisik juga akan semakin besar.

Faktor infrastruktur fisik yang terdiri dari dua variabel yaitu ketersediaan infrastruktur fisik dan kualitas infrastruktur. Variabel ketersediaan infrastruktur fisik memiliki bobot sebesar 0,571 atau 57% dari keseluruhan bobot faktor infrastruktur fisik. Variabel kualitas infrastruktur fisik memiliki bobot sebesar 0,429 atau 63% dari keseluruhan bobot faktor infrastruktur fisik. Persentase bobot dari masing-masing variabel faktor infrastruktur fisik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa responden menginginkan kualitas infrastruktur yang lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan pergerakan sumber-sumber ekonomi bagi peningkatan kegiatan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Akan tetapi, ketersediaan infrastruktur yang memadai juga sudah cukup bagi para responden dalam peningkatan daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi dimasa kini maupun mendatang.

Faktor Tenaga kerja dan Produktivitas

Tenaga kerja merupakan indikator yang penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah. Faktor tenaga kerja dan produktivitas terdiri dari 3 variabel, yaitu biaya tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja.

Variabel biaya tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,212 atau 21% dari keseluruhan bobot faktor tenaga kerja dan produktivitas. Variabel ketersediaan tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,457 atau 46%. Dan variabel produktivitas tenaga kerja memiliki bobot sebesar 0,331 atau 33% dari keseluruhan bobot faktor tenaga kerja dan produktivitas.

Berdasarkan analisis dan persepsi dari responden bahwa para responden menginginkan agar biaya tenaga kerja dapat ditingkatkan agar sesuai dengan besarnya UMK dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik.

Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan terdiri dari empat variabel yang akan menjadi penentu daya saing ekonomi, yaitu variabel kepastian hukum, variabel keuangan daerah, variabel aparatur dan pelayanan serta variabel peraturan daerah. Dari variabel-variabel yang menjadi penentu daya saing ekonomi untuk faktor kelembagaan semuanya adalah variabel yang secara langsung dibawah kendali pemerintah daerah.

Variabel kepastian hukum sendiri memiliki bobot sebesar 0.338 atau 34 %. Kemudian, variabel keuangan daerah atau pembiayaan pembangunan dengan

bobot sebesar 0.173 atau 17%. Variabel aparatur dan pelayanan dengan bobot sebesar 0.190 atau 19% dari keseluruhan bobot faktor kelembagaan. Dan variabel peraturan daerah memiliki bobot sebesar 0.299 atau 30% dari keseluruhan bobot faktor kelembagaan.

Disinilah peran dan fungsi pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penegakan hukum dan mengimplementasikan peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta kebijakan pembangunan daerah dalam merealisasi dan meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan APBD serta penyalahgunaan wewenang oleh aparatur.

Faktor Perekonomian Daerah

Faktor perekonomian daerah berisi variabel potensi ekonomi dan variabel struktur ekonomi yang merupakan hal yang penting dalam mendukung daya saing ekonomi suatu daerah. Semakin baik tingkat perekonomian suatu daerah, maka daya saing daerah tersebut akan semakin tinggi. Variabel potensi ekonomi memiliki bobot sebesar 0.750 atau 75% dari keseluruhan bobot faktor perekonomian daerah. Variabel struktur ekonomi memiliki bobot sebesar 0.250 atau 25% dari keseluruhan bobot faktor perekonomian daerah.

Dari tanggapan responden, variabel potensi ekonomi dianggap lebih penting dan yang menjadi prioritas dalam indikator perekonomian daerah dalam menentukan daya saing ekonomi Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara persepsi para responden, variabel struktur ekonomi dapat dikatakan semakin membaik, dan nilai tambah atau kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier cenderung semakin meningkat. Namun potensi ekonomi diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

Faktor Sosial Politik

Faktor sosial politik penting dalam menentukan daya saing ekonomi suatu daerah. Suatu kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan lancar tanpa di dukung oleh keamanan dalam menjalankan dunia usaha, kondisi politik yang stabil, partisipasi, keterbukaan, serta perilaku masyarakat yang mendukung kegiatan usaha. Faktor sosial politik terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel stabilitas politik, variabel keamanan, dan variabel budaya masyarakat.

Variabel stabilitas politik memiliki bobot 0.363 atau 37% dari keseluruhan bobot faktor sosial politik. Variabel keamanan memiliki bobot 0.393 atau 39% dari keseluruhan bobot faktor sosial politik dan variabel budaya masyarakat memiliki bobot 0.245 atau 24% dari keseluruhan bobot faktor sosial politik.

Dari keseluruhan variabel-variabel faktor sosial politik diatas, secara keseluruhan, faktor sosial politik dianggap cukup baik untuk menjadi penentu daya saing ekonomi Kabupaten Asahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka dapat di simpulkan, beberapa hal antara lain :

1. Faktor penentu daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi adalah faktor Infrastruktur fisik yang memiliki bobot sebesar (0,272). Kemudian diikuti oleh faktor tenaga kerja dan produktivitas (0,239), faktor kelembagaan (0,205), faktor perekonomian daerah (0,169) serta faktor sosial politik (0,116).
2. Untuk variabel yang memiliki nilai tertinggi pada faktor infrastruktur fisik adalah variabel ketersediaan infrastruktur fisik yang memiliki bobot sebesar 0,571 dan variabel kualitas infrastruktur fisik dengan bobot sebesar 0,429.
3. Untuk faktor tenaga kerja dan produktivitas memiliki 3 variabel pendukung, yaitu variabel ketersediaan tenaga kerja yang memiliki bobot sebesar 0,457. Kemudian, diikuti oleh variabel produktivitas tenaga kerja yang memiliki bobot sebesar 0,331 dan yang terakhir diikuti oleh variabel biaya tenaga kerja yang memiliki bobot sebesar 0,212.
4. Faktor kelembagaan yang memiliki nilai bobot paling tinggi adalah variabel kepastian hukum dengan memiliki bobot sebesar 0,338. Kemudian, variabel peraturan daerah yang memiliki bobot sebesar 0,299, variabel aparatur dan pelayanan dengan bobot sebesar 0,190. Dan yang terakhir adalah variabel keuangan daerah atau pembiayaan pembangunan dengan bobot sebesar 0,173.
5. Untuk faktor perekonomian daerah dengan variabel yang memiliki bobot tertinggi adalah variabel potensi ekonomi dengan bobot sebesar 0,750 dan variabel struktur ekonomi dengan bobot sebesar 0,250.
6. Sosial politik memiliki 3 variabel yaitu, variabel keamanan dengan bobot 0,393. Kemudian, Variabel stabilitas politik yang bobot 0,363 dan variabel budaya masyarakat memiliki bobot 0,245.

Saran

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal untuk yang pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Perlunya memperbaiki kualitas dari infrastruktur agar dapat terciptanya ketertarikan investor serta memunculkan kegiatan-kegiatan usaha yang baru dalam hal mampu meningkat daya saing ekonomi Kota Tebing Tinggi.
2. Perlunya Pemerintahan Kota Tebing Tinggi memperbaiki struktur ekonomi yang ada baik itu primer, sekunder, maupun tersier agar perekonomian daerah dapat lebih baik dan meningkat.
3. Perlu diadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik seperti pelayanan birokrasi yang sangat dipersulit agar dapat dipermudahkan serta penyalahgunaan wewenang yang tidak seharusnya terjadi serta masih banyaknya terjadi penyimpangan dalam penggunaan APBD agar dapat di transparansikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,P, dkk, (2002). Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010. Kota Tebing Tinggi Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik, 2011. Kota Tebing Tinggi Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik, 2012. Kota Tebing Tinggi Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik, 2013. Kota Tebing Tinggi Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik, 2014. Kota Tebing Tinggi Dalam Angka.
- Camagni, R., 2002. *On the concept of territorial competitiveness : sound or misleading?* ERSA conference papers ersa02p518, European Regional Science Association
- Commission, European 1999. *'Economics of Development Emperical'*
- Hidayat, Paidi, 2012. "Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan", Jurnal Keuangan dan Bisnis, Volume 4 Nomor 3, hal 228-238
- Irawati, Ira, dkk, (2008). Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPPOD (2005) Daya Tarik Investasi 214 Kabupaten/kota di Indonesia tahun 2004. Jakarta : KPPOD
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggi Rahajeng.(2005). Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No. 2, Hal. 171 – 184. Yogyakarta
- Millah, Anita Nur, 2013 "Analisis Daya Saing Daerah di Jawa", *Skripsi*, Semarang.
- Porter, M.E. (2000). Location, *Competition and Economic Development: Local Cluster in Global Economy*. *Economic Development Quarterly* Vol. 14 No. 1, Hal. 15-34
- PPSK BI dan LP3E FE UNPAD.(2008). *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saaty, Thomas L. (1990). *Decision Making For Leader: The Analytic Hierarchy Process For Decision in A Complex World*. Pittsburgh : Univesity of Pittsburgh.
- . (2002). Hard Mathematics Applied to Soft Decisions. *Indonesian Symposium Analytic Hierarchy Process II Teknik Industri Universitas Kristen Petra* Surabaya, Tidak Dipublikasikan, Surabaya : Universitas Kristen Petra.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah.(2011). Penelitian Kuantitatif, alfabeta. Bandung.
- UK-DTI dan Regional Competitiveness Indicator and Centre For Urban and Regional Studies. (1998). *Competitiveness Project 1998 and Regional Banchmarking Report*.
- World Economic Forum. (2014). *The Global Competitiveness Report*. Oxford University Press, New York.